

Naik Truk untuk Hemat Ongkos Hanya Orang Miskin Diurus, Masyarakat Menengah Bawah "Ngos-ngosan"

ESTER LINCE NAPITUPULU

Jakarta, kompas - Menyiasati pengeluaran pascakenaikan harga bahan bakar minyak bukan saja dilakukan masyarakat miskin, tetapi juga masyarakat kelas menengah bawah. Bahkan, demi menghemat ongkos transportasi supaya tidak menghabiskan hingga 50 persen gaji yang berkisar Rp 1 juta-Rp 1,5 juta per bulan, ada yang rela menumpang trailer dari kantornya.

"Pemerintah hanya mengurus masyarakat miskin. Dikira kami-kami ini tidak ngos-ngosan setelah tarif angkutan naik gila-gilaan," kata Ny Ani, warga Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (13/10).

Meski gajinya sekitar Rp 2,5 juta, tetap saja kenaikan tarif angkutan membuatnya ngos-ngosan. Sebab, transpor untuk dirinya saja sehari lebih dari Rp 15.000. Belum untuk dua anaknya yang sekolah di daerah Klender, Jakarta Timur.

Demi menghemat ongkos, Fifi (32), seorang karyawan perusahaan jasa pengangkutan di kawasan Cakung, Jakarta Timur, bahkan tidak malu sering-sering nebang trailer milik perusahaannya sampai Tanjung Priok. "Lumayan, bisa menghemat Rp 6.500," katanya.

Fifi yang terpaksa menitipkan anaknya kepada orangtuanya di Bogor karena tak sanggup membayar pembantu itu mengeluarkan biaya transportasi Rp 20.000 setiap harinya. "Kalau saya tidak mencari cara untuk menghemat, kasihan anak saya. Sekarang saja dia sudah tidak minum susu yang biasa saya berikan karena mahal. Untung dia tidak rewel," ujarnya.

Demi menghemat ongkos pula, Tati (26), warga Bekasi yang bekerja di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, rela berjalan kaki sekitar 500 meter ke rumah abangnya. Dari sana, ia menumpang motor abangnya sampai Kebon Sirih, Jakarta. "Dari sana saya naik busway, terus sambung metromini," katanya.

Separuh gaji

Pulanginya, Tati berjalan kaki sekitar 15 menit menuju perempatan Lebak Bulus untuk menghemat Rp 2.000. "Dibelain begitu saja, setengah gaji saya hanya habis untuk ongkos," kata wanita yang mengaku bergaji Rp 1,2 juta itu.

Mulyani (27), seorang staf administrasi di sebuah counter di WTC Mangga Dua Serpong juga mengaku semakin berat menanggung beban ongkos angkutan. Sebab, setiap hari ia harus mengeluarkan Rp 18.000 untuk perjalanan dari rumahnya di Periuk, Tangerang.

Total dana yang dialokasikannya untuk transportasi Rp 468.000. Padahal, gajinya sebagai staf administrasi hanya sedikit di atas UMR Tangerang.

Sejumlah buruh di Tangerang mengaku harus mengencangkan ikat pinggang yang sudah kencang. Dengan pendapatan berkisar Rp 800.000 per bulan, tak ada lagi jajan di luar atau memberi sekadar uang atau makanan kepada orangtua dan keluarga.

Menu makan sehari-hari juga hanya sayur, tempe, dan ikan seadanya. "Kalau untuk daging, terus terang saja duitnya enggak sampai," kata Neneng, buruh di PT Panarub, Tangerang. Padahal, Neneng dan suami sama-sama bekerja.

Untuk menghemat ongkos, para pekerja pabrik yang tinggal di luar kota dan biasanya naik ojek untuk mengejar waktu kini memilih berjalan kaki. Konsekuensinya, mereka harus sudah berangkat dari rumah sebelum pukul

Sopir Taksi Memilih "Mangkal"

Jakarta, Kompas - Kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 Oktober lalu hingga kini berdampak pada sopir-sopir taksi. Mereka lebih memilih mangkal daripada berjalan berputar-putar mencari penumpang.

Berdasarkan pemantauan Kompas, Kamis (13/10), sejumlah sopir taksi mengatakan, jumlah penumpang menurun drastis setelah ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Saya memilih mangkal untuk menghemat bahan bakar, supaya komisi yang saya peroleh cukup lumayan," kata Muji Mulyo (40), sopir taksi Blue Bird yang sedang mangkal di Jalan Metro Pondok Indah.

Muji mengatakan, pada Rabu lalu sempat mengangkut penumpang dengan perolehan Rp 207.000, jauh dari target Rp 425.000 untuk mendapat komisi Rp 80.000. Akhirnya, dalam sehari dengan perolehan Rp 207.000 dan menghabiskan bensin 26 liter, Muji hanya memperoleh komisi Rp 16.000.

Lain lagi Kadira (43), sopir taksi Jaya Sakti yang ditemui di kompleks Sarinah, Jakarta Pusat. Dia mengatakan, dalam sehari dirinya memperoleh Rp 200.000 dari ongkos penumpang. Namun, ketika pulang kandang ia harus membayar ongkos bensin yang telah dihabiskan sebesar Rp 125.000 dan membayar setoran Rp 175.000.

"Saya bekerja menjadi serba salah. Ingin mendapat uang, malah mendapat utang di kantor karena setoran dinyatakan kurang," kata Kadira.

Nasib serupa diutarakan sopir-sopir taksi lainnya yang ditemui di Jalan Gatot Soebroto. Marpu beserta kawan-kawannya yang menjadi sopir taksi Kosti Jaya, mengatakan, setiap kali pulang kandang dinyatakan kurang setoran. Akhirnya, kekurangan setoran itu dianggap utang.

"Saya serba salah juga. Kalau bekerja malah mendapat utang yang harus dibayar kemudian. Kalau tidak bekerja, orang yang di rumah juga marah-marah," kata Marpu. (NAW)

Pengemis Kian Banyak dan Padati Perempatan

Jakarta, Kompas - Menjelang Lebaran dan pascakenaikan harga bahan bakar minyak, pengemis dan anak-anak jalanan bertambah banyak dan memadati perempatan-perempatan jalan di Ibu Kota. Jumlah mereka diperkirakan meningkat dua kali lipat jika dibandingkan dengan sebelum kenaikan harga BBM.

Menurut pengamatan dan keterangan warga di beberapa perempatan utama, Kamis (13/10), bertambahnya pengemis itu dipicu beban hidup yang semakin berat pascakenaikan harga BBM. Mohammad (37), pengojek yang sehari-hari mangkal di sekitar Perempatan TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, mengatakan, jumlah pengemis di perempatan itu kini 50-an orang. Sebelumnya jumlah mereka 30-an orang.

Para pengemis itu umumnya meminta-minta kepada pengendara mobil atau motor sambil menggendong anaknya. Tidak ketinggalan, anak-anak berusia 6-12 tahun juga dilibatkan dalam aktivitas tersebut. Bahkan, tidak jarang anak-anak itu lebih sering dikerahkan untuk mengemis, sementara ibu mereka beristirahat di tempat teduh.

Pemandangan serupa terlihat di Perempatan Coca-Cola, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bungsu (37), penjual minuman di perempatan itu, menuturkan, para pengemis di tempat tersebut kini meningkat, dari sebelumnya sekitar 100 orang menjadi hampir 200-an orang. Di perempatan ini pengemis meminta-minta uang setelah mengelap mobil dengan bulu ayam.

Tini (31), pengemis di Perempatan Coca-Cola, mengaku, setelah kenaikan harga BBM pendapatannya menurun dari Rp 25.000-Rp 30.000 menjadi sekitar Rp 15.000 per hari. (SAM)

Solar Tidak Terbeli, 267 Unit Kapal Nelayan Menganggur

Medan, Kompas - Sedikitnya 267 unit kapal motor milik nelayan di Pelabuhan Perikanan Gabion, Belawan, Sumatera Utara, dua minggu belakangan tidak melaut. Kapal ikan berbobot di atas 30 gross tone (GT) tersebut menganggur karena nelayan tak mampu lagi membeli solar dengan harga baru.

"Ini betul-betul pukulan telak bagi usaha perikanan di Sumatera Utara (Sumut), khususnya kami yang sandar di Gabion Belawan. Harga solar baru untuk nelayan yang dipatok sama dengan harga solar untuk industri membuat aktivitas nelayan di Gabion mulai sekarat," ungkap RB Sihombing, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) kepada Kompas di Belawan, Kamis (13/10).

Karena hampir 50 persen kapal ikan tidak melaut, produk perikanan tangkap dari Gabion dua minggu belakangan anjlok hampir separuh. Padahal, dalam sehari sekitar 200 ton berbagai jenis dibongkar di Gabion. Ikan ini selain untuk pasar lokal, sekitar 65 persen untuk ekspor.

Diungkapkan, seiring kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak awal Oktober 2005, Pertamina Unit Pemasaran I menetapkan harga jual minyak solar untuk kapal-kapal nelayan berkapasitas di atas 30 GT disesuaikan dengan harga pasar untuk industri yakni Rp 6.000 per liter. Kapal nelayan maksimum hingga 30 GT dengan konsumsi solar paling banyak 30 kiloliter per bulan, memperoleh BBM subsidi.

Diingatkannya, Pertamina seyogianya memahami perbedaan GT kapal ikan selama ini semata-mata hanya untuk pembagian areal tangkap (fishing ground). Bukan untuk besar-kecilnya usaha. Karena kalau tidak ada pembagian GT kapal, akan terjadi rebutan penangkapan di laut.

Selain itu, kata Sihombing, usaha perikanan di Gabion, Belawan, berkarakteristik tersendiri karena biaya operasional penangkapan di laut ditanggung bersama pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK). Perbandingan rata-rata berkisar 60-65 persen tanggungan pemilik kapal dan sisanya 35-40 persen ABK. Pembagian hasil tangkapan juga dipatok berdasar persentase itu.

Selain itu, meski 70 persen dari 476 unit kapal ikan di Gabion berkapasitas di atas 30 GT, usaha perikanan di kawasan ini sarat kemiskinan. Ribuan ABK dan keluarganya hidup pas-pasan.

Atas dasar itu, tidak tepat kalau usaha perikanan di Gabion disamakan dengan industri sehingga harga solar pun dipatok sama dengan industri. "Kami minta agar pemerintah pusat dan Pertamina meninjau ketentuan harga BBM baru bagi usaha perikanan," tegas Sihombing. (zul)

Rakyat Merambah Hutan **Lingkungan Hidup Bakal Terancam**

Bandung, Kompas - Mahalnya harga bahan bakar minyak yang sampai ke pelosok desa, hingga 50 persen dari harga awal, memastikan penggunaan kayu bakar meningkat. Dan, dikhawatirkan terjadi perambahan hutan oleh penduduk desa untuk mendapatkan kayu bakar.

Demikian dijelaskan Ikim Zainal Muttaqin, Ketua Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat I. Menurut dia, kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi, maupun hutan produksi, sangat rawan terhadap perambahan penduduk yang ada di sekitarnya.

"Pelakunya bisa siapa saja, terutama penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan itu," ungkap Ikim di kantornya, Kamis (13/10).

Namun, ditegaskan anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, S Sobirin, rakyat tak bisa disalahkan dengan perambahan hutan. Menurut dia, hal itu disebabkan harga BBM saat ini, khususnya minyak tanah, tak bisa terbeli oleh warga di tepian hutan. Dengan demikian, penduduk terpaksa menebang hutan untuk mendapatkan sumber bahan bakar, yaitu kayu.

Awalnya, dijelaskan Sobirin, penduduk hanya akan mengambil ranting-ranting yang jatuh di sekitar hutan. Tetapi, karena kebutuhan meningkat, tak ada pengawasan dari aparat, serta untuk menambah stok kayu bakar, penduduk pun mulai menebangi pohon di kawasan hutan.

Menurut Ikim, luas hutan di Jawa Barat adalah 867.670 hektar atau 23 persen dari luas provinsi ini. Namun, hutan yang kritis jumlahnya pun sangat besar, sekitar 580.397 hektar. Jadi, perambahan yang tak terkendali dikhawatirkan akan membawa dampak buruk saat musim hujan. "131.000 hektar hutan yang telah rusak itu harus segera diperbaiki," kata Ikim.

Potensi longsor dan banjir, ujar Sobirin, makin besar. Pasalnya, fungsi hidrologi atau kemampuan penyerapan air oleh tanah tidak berjalan baik. Akibat lainnya, sumber mata air di kawasan hutan itu juga akan mengering atau hilang saat musim kemarau.

Bahan bakar alternatif

Sobirin mengatakan, pemerintah harus bertanggung jawab dengan kemungkinan perambahan hutan yang dilakukan penduduk desa karena harga minyak tanah yang mahal. Dengan demikian, pemerintah pun perlu menanam tanaman bahan bakar alternatif, seperti pohon jarak, di lahan rakyat sebagai solusinya.

Pengenalan dan pemasyarakatan bahan bakar alternatif pada penduduk desa harus gencar dilakukan. Selain itu, penyuluhan mengenai bahaya perambahan hutan pun harus dilakukan. Ikim menambahkan, penduduk desa juga perlu merehabilitasi lahan yang sudah kritis untuk meminimalisasi bencana yang akan terjadi.

"Pemerintah harus memerhatikan rakyat kecil, jangan sampai kenaikan (harga—Red) BBM menyebabkan perluasan perambahan hutan. Jadi, BBM boleh naik, asal kesejahteraan rakyat sudah mencukupi," ujar Sobirin menjelaskan. (d09)

Buruh dan Pengusaha Harus Saling Kompromi

Bandung, Kompas - Pengusaha meminta kepada para pekerja memahami kondisi yang sedang mereka hadapi, terutama pascakenaikan harga bahan bakar minyak. Naiknya harga BBM untuk industri telah memicu kenaikan biaya produksi cukup tinggi.

Keinginan para buruh atau pekerja untuk meminta kenaikan upah dikhawatirkan akan memicu rasionalisasi sehingga menutup perusahaan terkait.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bandung Aca Suparta, Kamis (13/10), mengatakan, sebaiknya pengusaha dan pekerja duduk bersama untuk merundingkan hal ini.

"Saat ini banyak pengusaha yang tidak ingin diganggu soal kenaikan upah. Soalnya, hal-hal lain sudah sangat mengganggu kinerja mereka. Kalau upah naik, sangat mungkin banyak perusahaan yang akan kolaps," katanya.

Namun, Aca juga tidak memungkiri adanya keinginan para pekerja agar upah atau gaji mereka dinaikkan. Menurut Aca, hal itu sangat lumrah mengingat kenaikan harga BBM kali ini sangat tinggi.

Aca menjelaskan, saat ini kondisi kemampuan industri di Indonesia sangat tidak memungkinkan untuk bisa bersaing dengan industri sejenis dari India dan China. Dengan biaya produksi yang tinggi seperti saat ini, industri dengan orientasi ekspor sama sekali tidak bisa bersaing di pasaran luar negeri.

Aca mengakui, biaya upah pekerja untuk industri tidak terlalu besar. Namun, ketika ada kenaikan di segala komponen, pengaruhnya akan terasa sekali terhadap biaya produksi.

Jaja, seorang pekerja pabrik tekstil di Kabupaten Bandung, yang ditemui kemarin, mengatakan, kenaikan harga-harga sangat memberatkan dirinya. Jaja yang memiliki keluarga dengan tiga anak mengaku kesulitan untuk mengelola pendapatannya saat ini.

Jaja mengaku mendapatkan upah senilai Rp 601.000 per bulan, sesuai dengan nilai upah minimum kabupaten setempat. Namun, pada kenyataannya, setiap bulan ia harus mengeluarkan biaya minimum sekitar Rp 800.000 untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Untuk itu, dia berharap agar pemerintah dan pengusaha bisa memahami kondisi pekerja di lapangan. Kenaikan upah merupakan dambaan setiap pekerja saat ini. Tentunya kenaikan yang sesuai dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok di pasaran saat ini.

Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan yakin, besaran nilai upah minimum provinsi bisa ditetapkan sesuai dengan target, yaitu 1 November 2005.

Hak prerogatif

Gubernur Jabar akan menggunakan hak prerogatifnya untuk menyelesaikan masalah upah buruh tersebut. Namun, dia akan berusaha sedapat mungkin agar seluruh proses dapat melewati mekanisme yang telah ditentukan.

Sebelumnya, Danny sempat bertemu dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, dia meminta Disnakertrans untuk membentuk dewan pengupahan Jabar.

Disnakertrans Jabar kemudian menyanggupi untuk mempersiapkan dewan pengupahan Jabar. Namun, Danny mengakui belum mengecek kesiapan dewan pengupahan. Dia mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk bertindak sesuai dengan aturan.

Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional menuntut kenaikan upah 130 persen dari nilai KHL yang baru.

Data Apindo Kabupaten Bandung menunjukkan, awal tahun 2005 ada sekitar 37 usaha dari berbagai sektor yang gulung tikar. Di antaranya sudah melakukan rasionalisasi biaya produksi maupun tenaga kerja. (mhd/bay)

Penjualan Kompor Cenderung Menurun

Tasikmalaya, Kompas - Pascakenaikannya harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu, penjualan kompor minyak tanah di Desa Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, menurun. Di samping itu, para pengusaha kompor pun terimbit karena harga bahan-bahan untuk kompor melambung.

Maman (39), pengusaha kompor, Kamis (13/10), mengatakan, biasanya menjelang bulan puasa dan Lebaran penjualan kompor mulai ramai. Namun, pengaruh kenaikan harga BBM sangat terasa. "Pembeli yang biasanya mengambil delapan kodi per minggu sampai kini belum membeli lagi," tutur Maman sambil menunjukkan deretan kompor yang masih menumpuk.

Penjualan eceran, menurut Maman, ikut menurun juga. Pembeli yang biasanya setiap hari rata-rata lima orang sekarang paling banyak tiga orang.

Minimnya penjualan ini diiringi dengan meningkatnya harga bahan-bahan pembuatan kompor. Besi yang biasanya seharga Rp 4.500-Rp 6.000 per kilogram kini naik sebesar 10-15 persen. Akibatnya, harga jual kompor pun terpaksa naik Rp 5.000.

Kompor dengan sumbu 16 buah kini dijual seharga Rp 45.000 dan yang bersumbu 20 buah Rp 65.000. Sedangkan kompor bersumbu 24 lebih mahal lagi, yaitu Rp 75.000.

Meski terimpit secara ekonomi, usaha kompor Maman yang dirintis sejak tahun 1959 ini akan tetap bertahan. "Selama ada yang memerlukan, saya akan tetap membuat. Kalau pakai kayu bakar kan di kota mah enggak ada, harus beli. Mau pakai gas malah lebih boros kan," ujar Maman.

Adapun Ujang (47), penjual kompor, menuturkan, omzet menurun sementara harga bahan-bahan kebutuhan naik dan pembeli berkurang. (d11)

Memilih Tinggal di Kandang Sapi, Memilih Solider

Sebuah keluarga di Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, terpaksa tinggal di kandang sapi. Kusananto (27) keluar dari kandang sapi yang ditinggali bersama istri dan dua anaknya. Masih tampak jelas bekas-bekas kotoran sapi yang telah kering menempel di dinding gubuknya.

Kusananto menyilakan tamunya duduk di bagian depan rumahnya yang sempit, kumuh, dan dengan aroma bau kotoran sapi. Rumah Kusananto sejak dua tahun lalu adalah kandang sapi berdinding anyaman bambu yang kini telah lapuk. Kandang menjadi kosong karena sapi milik Karang Taruna Dusun Cempluk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diambil.

Kandang ini bersebelahan dengan rumah orangtuanya yang dihuni sembilan orang, termasuk keluarga Kusananto. Ia dan keluarganya memutuskan pindah ke kandang sapi itu karena tak tega menyusahkan orangtuanya yang punya banyak tanggungan.

Sepekan lalu, Warmini (25), istrinya, yang hanya pencari rumput untuk pakan kambing, melahirkan anak kedua mereka. Kebahagiaan itu sekaligus menjadi beban baru bagi pasangan muda ini.

Kusananto hanya mampu membelikan satu kaleng susu selama istrinya hamil. Dan setelah bayi mereka lahir, Kusananto tak berdaya lagi membeli susu. "Bagaimana bisa beli susu, buat makan dua kali sehari saja sudah sulit. Masih untung berlauk tempe, biasanya hanya pakai garam. Apalagi satu bulan ini saya tak ada orderan kerja," ujar pria yang menjadi buruh tani tak tetap di sawah warga di sekitar rumahnya, Selasa (11/10).

Tak jauh dari kecamatan ini, Mbah Ngadiwiyono (75) di Dusun Kutu, Sumbermulyo, Bambanglipuro—juga di Bantul—adalah janda jompo yang sudah setahun ini mengidap penyakit beri-beri. Ia tinggal dalam gubuk kumuh dan lapuk berukuran 1,5 x 3 meter persegi. Berdinding anyaman bambu, rumah itu berlantai tanah yang kerap becek saat musim hujan.

Rumah Mbah Ngadiwiyono sebelumnya beratap jerami.

Namun, umat Gereja Ganjuran dekat rumahnya belum lama ini bergotong royong menggantinya dengan atap genteng.

Sejak ditinggal pergi suaminya 20 tahun lalu, Mbah Ngadiwiyono sehari-harinya menjadi buruh tani.

Namun, karena tak mampu lagi bekerja, ia kini tinggal mengandalkan bantuan anaknya, Tugilah, yang juga buruh tani, dan tetangga sekitar.

Sehari-hari Mbah Ngadiwiyono hanya bisa duduk di kursi panjang yang juga menjadi tempat tidurnya. "Kami juga tak punya uang untuk mengobati," ungkap Tugilah.

Saat bantuan tunai langsung (BTL) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bagi warga miskin didistribusikan 11 Oktober, keluarga Kusananto maupun Mbah Ngadiwiyono hanya diam di gubuk masing-masing. Karena tak didata petugas, begitu pengakuan keduanya, maka mereka tidak mendapat kartu PKPS.

Banyak warga tak mampu yang terlewatkan dari pendataan petugas pencacah di tiap dusun. Persoalan ini baru terungkap setelah kepala desa yang memiliki data keluarga miskin mendapati warganya yang tak mampu ternyata tak kebagian kartu PKPS.

Kegundahan yang sama dialami Padmo Suwito (90), warga Dusun Soka II, Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, termasuk sejumlah janda miskin di daerah itu. "Saya baru tahu ada bantuan PKPS setelah warga lain pulang dari kantor pos," ungkap Padmo.

Solidaritas kaum miskin

Akan tetapi, rakyat kecil rupanya selalu lentur mengolah hidup yang kian susah saat ini. Mereka selalu "tersisihkan" dari skenario kemiskinan yang identik dengan solidaritas.

Di Gunung Kidul, tepatnya di Dusun Blembenganlor, Candisari, Kecamatan Semanu, sebagian warga miskin penerima BTL PKPS BBM secara sukarela justru menyisakan sebagian uang BBM itu untuk kemaslahatan bersama.

Usai mengambil subsidi langsung di Kantor Pos Semanu, Rabu (12/10) siang, 73 warga yang menerima bantuan itu langsung menyisihkan Rp 10.000 setiap orang untuk disumbangkan ke masjid desa.

"Upaya ini kami lakukan dengan sukarela tanpa paksaan," ujar Gino (45), salah satu warga Blembenganlor.

Hal yang sama terjadi di Dusun Dengok, Pacarejo, Semanu, juga di Gunung Kidul. "Saya secara sukarela akan menyisakan uang itu untuk keperluan bersama. Berapa nilainya, saya belum tahu. Rabu sore ini rencananya akan dilakukan rapat bersama di balai dusun," tutur Tumirin (40), warga Dengok.

Jika Kusnanto memilih tinggal di kandang sapi dan sebagian besar warga Gunung Kidul penerima bantuan dana BBM memilih solidier untuk iuran demi lingkungan sosial mereka, rasanya inilah kaca benggala bagi pemerintah untuk bekerja dengan tertib, jujur, dan tetap memerhatikan wong cilik. (ITA/ART/HRD/WER)

Elpiji Langka, Penjualan Minyak Tanah Anjlok Drastis

Bandar Lampung, Kompas - Kelangkaan elpiji di Bandar Lampung semakin menjadi-jadi. Karena kurangnya pasokan, dealer elpiji resmi Pertamina membatasi penjualan, yakni hanya pada pelanggan tetap. Pembelian pun dibatasi hanya satu tabung untuk setiap pelanggan.

Antonius (29), pemilik dealer elpiji PT Elpinas di Jalan Kartini, Bandar Lampung, mengatakan, dalam seminggu terakhir ini pasokan gas elpiji dibatasi hanya 200 tabung per hari, padahal biasanya sampai 500 tabung. Terbatasnya pasokan ini membuat warga kesulitan memperoleh elpiji.

Wira Penjualan LPG dan Produk Gas Pertamina UP II Depot Panjang R Andi Mulya mengatakan, permintaan gas elpiji memang meningkat setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, Andi mengakui, beberapa minggu ini pengangkutan elpiji dari Palembang ke Bandar Lampung sedikit terhambat oleh perbaikan jalan lintas timur Sumatera.

Besarnya permintaan elpiji, menyusul kenaikan harga BBM, juga terjadi di banyak kota lain. Di Purwokerto, Jawa Tengah, permintaan elpiji untuk rumah tangga melonjak sampai 50 persen. Sebaliknya, pemakaian BBM—minyak tanah, solar, dan premium—turun hingga 60 persen.

"Sebelum kenaikan harga BBM, setiap hari dipasok tiga hingga empat tangki (8.000 liter). Sekarang satu tangki tidak habis dalam sehari," ujar seorang karyawan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Kota Purwokerto, Rabu (12/10).

Hampir semua pangkalan menolak pasokan minyak tanah karena penjualan lesu. "Permintaan BBM turun hingga 60 persen," ujar Anas Pribadi, Ketua Hiswana Migas Banyumas.

Banyak ibu rumah tangga memilih menggunakan elpiji yang dinilai lebih murah dibanding minyak tanah. "Satu tabung gas untuk rumah tangga (12 kilogram) harganya Rp 53.000 yang cukup untuk satu bulan. Jika menggunakan minyak tanah, setiap hari menghabiskan dua liter senilai Rp 4.500 per hari," ujar Ny Umilah (56), warga Arcawinangun.

Meningkatnya permintaan itu, menurut Husni Banser, Kepala Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat (Hupmas) Pertamina Unit Pengolahan (UP) IV Cilacap, menyebabkan terjadinya rush elpiji hingga tiga kali lipat sepanjang September 2005.

Di Provinsi Papua yang selama ini menghadapi persoalan berat menyangkut masalah angkutan, harga elpiji meroket pascakenaikan harga BBM awal Oktober. Di Kota Jayapura harganya kini sudah mencapai Rp 140.000 per tabung (12 kg), sementara di daerah pedalaman Rp 250.000 per tabung. Di Jayapura harga minyak tanah eceran Rp 5.000 per liter dan di pedalaman Rp 25.000 per liter.

Turun drastis

Para pengusaha angkutan bus antarkota di Palembang mengeluh karena jumlah penumpang turun sampai 50 persen. Anton Louis, kepala perwakilan Bus Ramayana di Palembang, Rabu, mengatakan, kenaikan harga BBM memaksa penyesuaian tarif bus yang dikelolanya. Ongkos bus Palembang-Yogyakarta, misalnya, naik dari Rp 247.500 menjadi Rp 317.500 per orang. Akibatnya, banyak warga yang menunda perjalanan mereka.

Selain angkutan darat, angkutan udara juga terpengaruh oleh penurunan jumlah penumpang. Veni Pontoh, Kepala Perwakilan Batavia Air di Palembang, mengatakan, load factor pesawat yang dikelolanya turun, dari 90 persen menjadi 70 persen per hari. (IRN/NTS/KOR/ECA/LKT)

Nelayan Tangerang Enggan Melaut

Tangerang, Kompas - Ratusan nelayan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, dan Desa Karangserang, Kecamatan Sukadiri, di pantai Kabupaten Tangerang, Banten, hari-hari ini memilih tidak melaut. Melambungnya harga solar dan minyak tanah telah membuat penghasilan mereka turun drastis.

Jika sebelumnya dari hasil melaut semalaman mereka bisa membawa pulang Rp 20.000-Rp 30.000 per hari, kini setiap nelayan hanya membawa pulang Rp 5.000. Akibat lebih lanjutnya, mereka banyak berutang ke warung atau anak-istri terpaksa makan ikan sisa tangkapan atau menunggu pemberian nasi dari tetangganya.

Apalagi sejak harga solar naik, perolehan ikan tak menentu, sementara harga hasil tangkapan tidak naik. "Biar dioplos tetap saja pendapatan tidak naik," ujar Wasimin, warga Sukawali, Selasa (11/10).

Tak hanya nelayan yang merasakan beban hidup yang makin berat, pemilik kapal dan pengepul hasil laut juga merasakan hal sama. Wasmin (35), pemilik 18 kapal, terpaksa mengistirahatkan sebagian besar kapalnya karena nelayan penyewanya tak mampu membayar biaya solar. Pemilik kapal biasa menerima sepertiga dari hasil tangkapan ikan penyewa kapal.

Sedangkan Radin yang biasa membeli hasil laut dari nelayan di Karangserang, Cituis, Sukawali, hingga Muara Karang di Jakarta Utara mengeluh sulit mendapatkan dagangan seperti sebelum kenaikan harga BBM. Penyebabnya, banyak nelayan tak melaut sehingga ketersediaan ikan di tempat pelelangan ikan sering kosong. "Tiga hari ini saya sama sekali tak mendapat dagangan. Rajungan kosong, udang juga kosong," tuturnya.

Berat

Sekalipun sebagian besar nelayan di Sukawali tercatat sebagai calon penerima dana kompensasi BBM tahun 2005, warga menyatakan tetap berat memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi semua harga barang naik.

"Kalau boleh memilih, lebih baik solar tidak naik, biar saja pendapatan suami saya tetap seperti dulu, masih cukup buat belanja," kata Samrah, seorang istri nelayan.

Sekarang, katanya, Rp 10.000 tak lagi cukup untuk belanja kebutuhan sehari-hari. "Tadi saya bawa duit Rp 20.000, kembalinya tinggal Rp 700," katanya. (tri)

Buruh di Jakarta Bingung untuk Menyiasati Hidup Mereka Khawatir Terkena Pemutusan Hubungan Kerja

ESTER LINCE NAPITUPULU

Jakarta, kompas - Karyawan dan buruh di Jakarta yang mengandalkan hidup hanya dari gaji bulanan sebesar upah minimum provinsi kebingungan untuk menyiasati hidup akibat naiknya harga berbagai barang kebutuhan. Mereka juga dibayangi kekhawatiran akan mengalami pemutusan hubungan kerja.

Sejumlah karyawan atau buruh berbagai perusahaan di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Selasa (11/10), mengatakan, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan lonjakan harga berbagai kebutuhan hidup yang cukup tinggi membuat mereka terpaksa berhemat luar biasa.

Padahal, selama ini mereka juga sudah menjalani kehidupan yang memprihatinkan karena minimnya upah yang didapat. Umumnya mereka mendapat gaji sebesar upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang nilainya Rp 711.843 per bulan.

Penghematan itu dilakukan antara lain dengan tidak lagi naik ojek sepeda motor dari depan kawasan industri untuk menuju perusahaan meskipun harus menempuh jarak tiga kilometer. Mereka juga mulai membawa makanan dari rumah supaya bisa menghemat pengeluaran.

Umumnya mereka juga berencana tidak mudik pada Lebaran tahun ini karena tidak sanggup menyediakan ongkos dan uang sekadarnya untuk keluarga di kampung. Bagi mereka, yang penting sekarang tetap bisa makan dan membiayai sekolah anak.

Kekhawatiran juga membayangi para buruh kontrak. Mereka sewaktu-waktu bisa saja dipecat jika perusahaan mengalami kebangkrutan dan mengurangi tenaga kerja. Buruh kontrak ini pun diberhentikan tanpa mendapat pesangon.

"Sudah tiga hari ini saya diliburkan karena di pabrik sedang tidak ada kerjaan. Tadinya hampir tiap hari saya datang sambil berharap siapa tahu perusahaan dapat borongan. Tetapi yang ada ya saya tekor di ongkos, kerjaan belum ada juga," kata Nur (25), buruh kontrak di salah satu perusahaan garmen.

Nur yang sudah tiga tahun menjadi buruh kontrak bertahan hidup dengan mengutang ke teman lain yang masih punya uang. Selain itu, dia tidak lagi membeli makan di warung makan supaya bisa menghemat pengeluaran.

Nur yang habis kontraknya pada tanggal 26 Oktober ini pesimistis jika tenaganya masih dipakai perusahaan. "Saya bingung bagaimana bisa bertahan hidup di Jakarta. Tabungan saja tidak punya. Padahal saya kan harus bayar kontrakan dan makan sendiri," kata Nur lesu.

Keluh kesah susah hidup juga disampaikan Suwandi (32), karyawan tetap sebuah perusahaan barang pecah belah di kawasan industri Pulo Gadung. Meski sudah enam tahun bekerja, gaji yang didapatnya tidak jauh berbeda dari buruh kontrak.

Suwandi yang mengontrak rumah di Pulo Jahe RT 06 RW 05, Cakung, Jakarta Timur, bersama istri dan seorang anaknya itu kini makan ala kadarnya saja, yang penting bisa kenyang. Dia pun tidak lagi membiarkan anaknya jajan meskipun terus merengek.

Beralih naik kereta api

Sementara itu di Depok, pemilik mobil dan sepeda motor yang bekerja di Jakarta berhemat dengan memilih naik kereta rel listrik (KRL) ekonomi dan eksekutif. Lonjakan penumpang yang cukup mencolok terjadi pada KRL Ekspres eksekutif jurusan Jakarta-Bogor.

Di Stasiun Bojong Gede, penumpang tanggal 3 Oktober lalu melonjak hingga 1.787 orang, sementara di hari-hari kerja sebelum kenaikan harga BBM penumpang berkisar 1.300 orang. Sementara di Stasiun Depok Lama, penumpang KRL Ekspres juga meningkat sebanyak 200-300 orang per hari, menjadi rata-rata 1.800 penumpang setiap harinya. (SF)

Mereka Mendengar Langsung Jeritan Konsumen

Abdul Lathief

Ada pengalaman tersendiri ketika menjual minyak tanah di kala harga minyak sedang mahal dan minyak tanah itu sendiri sulit didapat. Ada rasa sedih, takut, dan bangga menyelimuti perasaan penjual minyak tanah. Rasa takut muncul karena banyak konsumen ngomel.

Rasa kasihan muncul ketika pembeli menggerutu dan mengaku tidak punya cukup uang untuk beli minyak tanah. Tetapi, rasa bangga juga mencuat ketika mereka sedang membawa minyak tanah yang sedang dicari-cari orang. Seakan-akan kehadirannya adalah "penyelamat" dapur untuk bisa tetap ngebul.

Di tengah-tengah kenaikan harga bahan bakar minyak dan terus merangkaknya harga kebutuhan sehari-hari, para penjual minyak tanah mau tidak mau harus menghadapi ibu-ibu rumah tangga yang menggerutu atas kenaikan harga minyak tanah.

Mereka mengaku menjadi sasaran omelan ibu-ibu rumah tangga. "Padahal saya sendiri hidupnya susah. Saya tidak tega ketika mendengar ibu-ibu pelanggan saya menggerutu. Tapi mau bagaimana lagi, saya juga butuh hidup," kata penjaja minyak tanah keliling, Mutohir (38), asal Pemalang, Jawa Tengah.

Sebagai penjaja minyak tanah, dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus pula menaikkan harga jual minyak tanah. Dia mengaku menjual minyak tanah kepada para pelanggan antara Rp 2.600 sampai Rp 3.000 per liter.

"Ada yang menerima, ada pula yang ngomel-ngomel, harganya kok tambah mahal. Saya jelaskan, dari sono-nya sudah dinaikkan oleh pemerintah," tuturnya.

Bagaimanapun penjaja ataupun penjual minyak tanah keliling dari satu kampung ke kampung itu tetap manusia yang masih memiliki hati dan perasaan. Tatkala berhadapan dengan pelanggan yang hidupnya susah, dia pun menjualnya dengan harga lebih rendah dari harga yang ditawarkan seharga Rp 3.000 per liter.

"Saya lihat orangnya. Kalau hidupnya susah, ditawar Rp 2.600 per liter saya kasih," tuturnya. Dengan harga sebesar itu, Mutohir mendapat keuntungan Rp 300 per liter.

Di antara penjaja minyak tanah yang keseharian mewarnai kehidupan Jakarta, terdapat salah seorang penjaja minyak tanah yang usianya sudah uzur. Meskipun demikian, kakek dari lima cucu asal Pemalang, Jawa Tengah, itu tetap mengakrabi pekerjaannya sebagai penjual minyak tanah keliling dari satu kampung ke satu kampung yang lain demi satu tujuan, yaitu mencari nafkah untuk keluarganya di tanah kelahirannya.

"Sebelumnya saya menjajakan minyak tanah dengan pikulan, bukan dengan gerobak dorong seperti sekarang ini," kata penjaja minyak tanah keliling yang bernama Karjani (76) itu ketika ditemui Kompas, Selasa (4/10), di salah satu pangkalan minyak tanah di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Rekoso (sangat berat), itulah kehidupan sehari-hari yang dijalani lelaki tua kelahiran Desa Purana, Kecamatan Bantar Balong, Kabupaten Pemalang, itu.

Sejak kali pertama meninggalkan tanah kelahirannya, tahun 1970, Karjani sudah mengakrabi pekerjaan sebagai penjaja minyak tanah keliling di Jakarta.

"Waktu itu saya setiap hari mikul empat kaleng minyak tanah yang beratnya 60 liter," tuturnya.

Pahit getir dia rasakan sebagai penjaja minyak tanah keliling yang melayani pelanggan rumah tangga ataupun pemilik warung di sekitar kawasan Pulo Gadung.

"Kalau pelanggan baru, saya tidak berani ngasih utang. Biasanya yang ngutang itu pemilik warung yang sudah jadi langganan. Ibu rumah tangga pun ada yang ngutang dan baru bayar dua-tiga hari," ujar Karjani yang tinggal di rumah kontrakan di Pulo Gadung.

Patihin (45), penjaja minyak tanah yang masih kerabat dekat si kakek, mengatakan, setiap hari tidak kurang sebanyak 200 liter minyak tanah dia jajakan keliling dari Kampung Rawa Terate, Warung Jenggol, Pegangsaan, hingga Pulo Gadung Utara dan Timur.

Dengan gerobak dorong bermuatan 10 jeriken isi 20 liter per jeriken, bapak dua anak ini mengatakan dirinya baru mulai menjajakan minyak tanah keliling pada pagi hari pukul 07.00 hingga 11.00, dan sore hari pukul 14.00 hingga 17.00.

"Siangnya saya istirahat sebentar di rumah. Kalau sepanjang hari keliling, capek," katanya.

Sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak, dia mengaku menjual minyak tanah kepada para pelanggannya di kampung-kampung dan pemilik warung seharga Rp 1.200 per liter, namun sekarang setelah harga bahan bakar minyak naik, dirinya kebingungan harus menjual berapa harga per liternya. "Sekarang teman-teman penjaja keliling menjualnya dengan harga di atas Rp 2.500 per liter," ungkapnya.

Sebagai orangtua dari dua anak yang masih memerlukan biaya pendidikan, Patihin mengaku beban hidupnya berat karena hanya mengandalkan penghasilan dari minyak tanah. "Buat makan saja berat, apalagi saya harus membiayai sekolah anak saya di kampung," tuturnya.

Dia tidak sanggup memboyong keluarganya ke Jakarta karena tidak bakal sanggup membiayai kebutuhan sehari-hari.

"Kalau keluarga saya boyong ke sini, beban saya makin berat karena tidak ada penghasilan lain," katanya.

Mumpung tenaga kuat

Kendati terik matahari membakar seujur tubuhnya, para penjaja minyak tanah tersebut seakan tidak terusik tatkala menjajakan barang julanannya. Itulah sebuah potret kehidupan penjaja minyak tanah yang punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya di kampung.

"Mumpung tenaga saya masih kuat, setiap hari saya kadang berjualan tiga kali, bolak-balik dari pangkalan minyak ke rumah-rumah dan warung yang sudah jadi pelanggan," kata Mutohir, keponakan si kakek penjaja minyak tanah tersebut.

Pengamen Pun Sulit Dapatkan Recehan

Efek berantai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak bagaikan bola liar yang mengempas siapa pun tanpa pandang bulu. Pengamen Ibu Kota, yang sehari-hari mengais recehan di bus-bus kota, tak luput dari dampak kenaikan harga BBM itu.

Di zaman serba sulit seperti sekarang, uang recehan menjadi berharga. Penumpang angkutan umum, yang sebelumnya royal menjatuhkan kepingan uang recehan ke kantong plastik pengamen, kini seperti menahan diri. Situasi ini diperparah dengan tarif baru angkutan umum yang dibulatkan menjadi ribuan.

"Biasanya sekali ngamen di bus AC bisa dapat Rp 15.000. Sekarang bisa terkumpul Rp 5.000 saja sudah syukur. Ongkos bus naek, tidak ada sisanya lagi," ujar Adi (25), pengamen di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang tidak lulus STM.

Hal serupa dialami Eki (25), pengamen di Terminal Kampung Rambutan. Bagi pria yang harus menghidupi istri dan seorang anak balita itu, uang Rp 30.000 tak lagi mudah didapat seperti dulu. Bahkan, uang recehan Rp 500 dari sisa kembalian ongkos bus sulit diperoleh. Menghadapi kondisi saat ini, Eki cuma bisa pasrah terhadap keputusan penumpang: mau memberi atau tidak.

Belakangan ini sering kali dia mengamen di atas bus yang mengetem menunggu penumpang penuh tanpa mendapat uang sepeser pun. "Sekarang ini saya dan teman-teman lebih banyak nongkrong. Capek juga ngamen tapi yang memberi tidak ada. Bus saja lama banget penumpangnya penuh. Semua orang susah saat ini, ya saya maklum saja. Tetapi namanya rezeki, ya ada saja meski sedikit," ujarnya.

Eki sekarang ini sedang berusaha bisa mengumpulkan uang Rp 400.000 untuk membawa pulang anak dan istrinya ke kampung di Purwokerto, Jawa Tengah. Dia merasa tidak kuat menanggung hidup keluarganya di Jakarta dalam situasi yang sangat sulit ini.

Kesulitan yang kini dialami para pengamen jalanan tidak bisa dilepaskan dari kesulitan warga Ibu Kota pengguna angkutan umum itu. "Saya lihat, tidak sedikit penumpang yang punya sisa ongkos dikantongi lagi. Mungkin untuk ongkos naik besoknya lagi," kata Teguh (20-an), anggota Paguyuban Seniman Jalanan (PSJ) Komdak-Semanggi.

Dampak tarif bulat

Keluhan musisi jalanan itu berbeda dengan kekecewaan pengusaha dan awak angkutan kota DKI Jakarta terhadap tarif baru angkutan umum di Ibu Kota yang dinilai jauh lebih rendah daripada tuntutan mereka. Bukan soal tingginya tarif yang menjadi persoalan pengamen, tetapi soal tarif baru yang dibulatkan itu.

Untuk bus Patas AC, yang dulunya Rp 3.500, kini menjadi Rp 5.000. Bus sedang (kopaja, metromini, dan lainnya), yang tadinya Rp 1.400, kini menjadi Rp 2.000. Dengan tarif bulat seperti itu, praktis peluang mendapat recehan pun menipis. "Penumpang jadi enggak punya sisa uang receh yang biasa diberikan ke kami," kata Endang (45), pengamen asal Cimone, Tangerang.

Tanggal 1 Oktober 2005, saat harga baru BBM ditetapkan, menjadi awal suramnya kehidupan pengamen. "Satu hingga tiga hari setelah harga BBM naik, bisa dibilang tidak ada penumpang yang mau dengar kami nyanyi. Mereka sibuk adu mulut dengan kernet soal tarif," tutur pria yang mengaku sudah 15 tahun mengamen untuk menghidupi istri dan dua anaknya itu.

Seperti sopir dan kernet yang harus mengejar setoran, pengamen juga terpaksa "berjibaku" dengan lebih sering naik-turun bus agar pendapatan tidak terlalu anjlok. (ELN/SAM)

Penerbit di Jawa Barat Mulai Kurangi Produksi

Bandung, Kompas - Naiknya harga bahan bakar minyak hingga di atas 100 persen berdampak buruk terhadap usaha penerbitan buku di Jawa Barat. Banyak usaha penerbitan yang mulai mengurangi produksi penerbitannya karena tingginya biaya produksi.

Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Provinsi Jabar Asril Das ketika dihubungi, Selasa (11/10), mengemukakan, walaupun belum gulung tikar, banyak di antara penerbit di Jabar mulai kesulitan berproduksi.

"Ini terutama dikarenakan kenaikan harga bahan baku kertas sebagai akibat kenaikan harga BBM. Selain itu, biaya transportasi ikut naik, sementara harga buku belum bisa naik," ujarnya.

Selain soal harga jual buku, kendala lain adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat makin tingginya biaya hidup. Sebagian besar masyarakat lebih mementingkan kebutuhan untuk mengisi perut daripada membeli buku.

Asril menjelaskan, komponen yang paling terpengaruh akibat tingginya kenaikan harga BBM adalah kertas. Selain itu, harga pelat, bahan-bahan kimia, film mikro yang semuanya masih menggunakan barang-barang impor, serta fluktuatifnya nilai kurs mata uang asing terhadap rupiah.

"Saat ini, harga kertas HVS 70 gram naik dari Rp 7.000 menjadi Rp 10.000 per kilogram. Naiknya sekitar 42 persen. Belum lagi kenaikan komponen produksi lainnya. Paling tidak, kalau memang (harga buku) bisa naik, harus sesuai dengan kenaikan harga kertas tadi," paparnya.

Namun, penerbit tidak bisa seenaknya menaikkan harga buku mengingat rendahnya daya beli masyarakat saat ini.

Meski dalam kondisi sulit, pihaknya hingga saat ini masih belum menerima laporan ada usaha penerbitan yang gulung tikar. Sebanyak 155 penerbit yang tergabung dalam Ikapi Jabar tetap berproduksi meski harus mengurangi jumlahnya.

Subsidi kertas

Untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM yang tinggi terhadap usaha penerbitan, Asril berharap pemerintah memberikan insentif berupa subsidi terhadap harga kertas. Dengan subsidi tersebut, diharapkan beban biaya produksi yang harus dikeluarkan penerbit bisa ditekan.

Penerbit Darmizan-Bandung, saat ini sedang memperhitungkan kenaikan harga buku produksinya. Fan Fan H Darmawan, staf Promosi dan Humas Darmizan, menjelaskan, kenaikan yang akan diberlakukan oleh pihaknya tidak akan sesuai dengan besaran angka kenaikan harga BBM. Pihaknya juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan daya beli masyarakat. (mhd)

Petani Purwakarta Tak Nikmati Harga Tinggi

Purwakarta, Kompas - Meski harga cabai merah di pasaran saat ini Rp 25.000 per kilogram, para petani di Desa Cilingga, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, hanya menikmati harga Rp 13.000 per kilogram.

Selain itu, mereka juga tengah menghadapi serangan kutu dan ulat yang menurunkan jumlah produksi cabai hingga 50 persen.

"Para pemborong beralasan biaya angkutan naik, dan kami tidak tahu banyak tentang harga di pasaran. Harga Rp 13.000 per kilogram itu sudah bagus karena kadang harganya turun hingga Rp 3.500 per kilogram saat panen," kata Amat, salah satu petani cabai di Desa Cilingga, pekan lalu.

Amat menambahkan, para pembeli itu mengatakan bahwa ongkos angkut menuju pasar naik hingga 100 persen. "Mereka bilang, kalau dulu misalnya hanya Rp 50.000, sekarang bisa lebih dari Rp 100.000," katanya menirukan para pembeli.

Berdasarkan pengamatan, sebagian besar tanaman cabai milik petani di daerah tersebut terserang kutu. Sebagian besar cabai dari daerah itu dijual ke Pasar Induk Cibitung Bekasi dan beberapa pasar tradisional di Purwakarta.

Beberapa petani menanam tomat di sela-sela tanaman cabainya. "Kalau harga tomat sedang anjlok, harga cabai bisa ikut membantu mengurangi ongkos produksi. Sekarang kan tomat sedang turun hingga Rp 500 per kilogram, jadi bisa tertolong harga cabai," ujar Amat. (d08)

Bahan Pokok Terus Naik **Warga Merasa Semakin Kesulitan**

BM Lukita Grahadyarini

Palembang, Kompas - Harga bahan-bahan pokok di sejumlah pasar di Palembang, Sumatera Selatan, merambat naik. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas sayur-mayur, mencapai 100 persen. Peningkatan harga sembilan bahan pokok itu dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak awal Oktober lalu.

Meski demikian, kenaikan tersebut belum merata untuk semua jenis bahan kebutuhan pokok.

Berdasarkan pemantauan Kompas di beberapa pasar tradisional di Palembang, Selasa (11/10), kenaikan harga tersebut belum merata untuk semua jenis kebutuhan pokok. Kenaikan harga umumnya terjadi pada komoditas gula pasir, beras, minyak goreng, daging sapi, serta beberapa jenis sayuran, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah.

Dewi Murni, penjual sayur di Pasar Cinde, menyebutkan, kenaikan harga paling mencolok terjadi untuk jenis cabai merah dan cabai rawit. Harga cabai rawit melonjak dari Rp 5.000 menjadi Rp 15.000 per kg, dan harga cabai merah naik dari Rp 10.000 menjadi Rp 20.000 per kg.

Harga bawang merah juga naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 7.000 per kg, bawang putih dari Rp 4.000 menjadi Rp 6.000 per kg, jagung naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 15.000 per kg.

Menurut Dewi, kenaikan itu berlangsung sejak kenaikan harga BBM. "Harga-harga biasanya akan terus naik sampai Lebaran," tutur Dewi.

Sementara itu, harga beras kualitas rendah naik dari Rp 3.300 menjadi Rp 3.500 per kg, sedangkan beras kualitas sedang dari Rp 3.500 menjadi Rp 3.800 per kg. Harga gula pasir masih Rp 6.000 per kg, naik dari Rp 5.500 per kg. Kenaikan harga juga terjadi untuk daging sapi, dari Rp 45.000 menjadi Rp 50.000 per kg. Sementara harga minyak goreng naik dari Rp 4.800 menjadi Rp 5.000 per kg.

Mengeluh

Sejumlah ibu rumah tangga mengeluhkan kenaikan harga sembako yang menambah beban ekonomi mereka. Kusnawati, warga RT 1 RW 1, Kelurahan Kalidoni, mengaku terpaksa menaikkan uang belanja dari Rp 10.000 menjadi Rp 20.000.

"Dengan uang belanja Rp 10.000, saya bisa dapat apa?" tutur Kusnawati, janda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

"Memang kalau bulan Puasa harga-harga bahan pokok semakin mahal, apalagi harga BBM naik. Tapi bagaimana lagi, memang sudah jadi kebutuhan, terpaksa uang belanja dinaikkan dua kali lipat," keluh Uun, yang juga pegawai negeri di Dinas perhubungan di Palembang.

Tanda-tanda Sudah di Depan Mata

Gesit Ariyanto

Siang itu pasangan suami istri Udin (35) dan Saidah (33) duduk di lantai teras kontrakan yang berukuran 4 x 6 meter persegi dengan wajah kusut.

Rumah tersebut berimpit dengan rumah lain di Gang Masjid/Irma RT 008 RW V, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dan telah mereka huni sepuluh tahun.

Ketiga anak mereka berlarian sambil bercanda. Si bungsu, Febi (2), sesekali menghampiri dada ibunya untuk menetek.

Si sulung yang beranjak delapan tahun tak mengenal bangku sekolah. Hidup makin getir pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Udin, kuli bangunan serabutan berupah Rp 40.000 per hari itu muram membayangkan masa depan. Tiga anak perempuannya butuh makan.

Namun, harga minyak tanah untuk memasak naik tiga kali lipat. Belum lagi harga beras berikut lauk-pauknya. Padahal sebelum kenaikan harga pun ia sudah biasa menganggur 2-3 bulan.

Dulu saja ketiga anaknya tak jarang makan seadanya. Nasi bertabur garam adalah menu harian bila tak ada pekerjaan. Lauk ikan asin dan sedikit sayur baru dinikmati bila ada rezeki. "Anak-anak sudah biasa. Mereka tak pernah rewel," kata Saidah.

Seperti orang kalah, mereka harus rela menerima kenyataan. Kekalahan berlipat karena mereka tak termasuk penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM Rp 300.000 per tiga bulan, gara-gara tak punya KTP. Pernah Udin berupaya membuat KTP, tetapi urung karena harus bayar Rp 150.000.

Menyiasati

Tak ada cara lain. Beberapa ibu rumah tangga berupaya menyiasati kenyataan pahit saat ini. Ny Siti dan Ny Desi, warga RT 002 RW XIV, Grogol Utara, di Kebayoran Lama, misalnya, mengurangi jatah lauk dan susu untuk anaknya.

Menurut Ny Siti yang beranak lima, biasanya ia membeli ikan bandeng dua ekor untuk seluruh keluarga. Kini cukup satu ekor. Konsumsi susu ketiga anaknya pun dikurangi.

Hal serupa diungkapkan Ny Desi yang memiliki anak usia lima bulan. "Dulu kalau bikin susu kental, sekarang terpaksa diencerin. Tapi saya tidak kurangi porsi makannya," ucapnya.

Keduanya mengeluh, pengeluaran harian mereka rata-rata naik 50 persen per item. Belum lagi ongkos angkutan umum.

Namun, Ny Mia (40), yang tinggal di rumah papan beratap bolong-bolong di Gang Mushola, RT 004 RW I, Kelurahan Pondok Aren, Tangerang, tak mampu lagi bersiasat. Suaminya bekerja serabutan. Seminggu lalu ia melahirkan anak kedelapan bernama Rahmat, dengan berat badan dua kilogram. Di rumah berlantai tanah itu tinggal pula ayahnya, keluarga kakak, dua adik, dan juga menantunya.

"Hidup tambah susah," kata Timah (55), kakak kandung Mia, yang baru sebulan berhenti kerja sebagai pembantu rumah tangga. Timah bersuamikan penjual bayam, beranak lima.

Mereka bertanya bagaimana agar bisa mendapatkan dana kompensasi BBM. Kalau alasannya KTP, rumah keluarga Betawi turun-temurun itu tak lebih dari satu kilometer dari Kelurahan Pondok Aren.

Jangankan Rp 100.000 per bulan, berapa pun akan mereka terima untuk membeli kebutuhan pokok, beras dan minyak tanah apalagi. "Saya sekali masak perlu dua liter beras," kata Mia.

Dua liter artinya Rp 6.000 (sebelumnya Rp 4.000) hanya untuk beras kualitas rendah. Belum lagi minyak tanahnya. Lauk? Jangan bayangkan telur yang per butirnya sudah Rp 600.

"Pokoknya sekarang mah berat. Perang aja sekalian...," kata Maya, yang punya anak umur dua tahun, cucu pertama Mia.

Generasi otak kosong

Melemahnya daya beli masyarakat menjadi ancaman besar bagi masa depan bangsa. Data sepanjang tahun 1990-2003 menunjukkan, jumlah anak balita kurang gizi mencapai 8,31 persen atau sekitar 23 juta.

Dampak kurang gizi adalah terhambatnya pertumbuhan otak dan fisik. Peneliti di Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Mahliil Ruby MD MPH mengatakan, generasi yang hilang (lost generation) dipertaruhkan pada usia balita.

Begitu melewati usia dua tahun tanpa asupan gizi seimbang, apalagi sampai usia lima tahun tak ada intervensi gizi, kondisinya tak dapat diperbaiki lagi. Jadilah generasi yang hilang.

Salah satu indikasinya, citra CT-Scan akan memperlihatkan gambar otak yang tidak padat alias otak kosong. Balita demikian memiliki kecerdasan intelektual rendah.

Hal serupa diungkapkan Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi. Sayang, di tengah kemiskinan di Indonesia kebijakan pemerintah justru melemahkan daya beli masyarakat.

Pemerintah merasa cukup dengan memberi "sekoci" Rp 100.000 per bulan per keluarga, padahal peran untuk memproteksi anak balita mati suri. Persoalan ini menjadi "bom waktu" begitu mereka dewasa.

Menurut Palupi, pemerintah belum juga beranjak dari pendekatan lama: bergerak setelah telanjur darurat dan dengan solusi jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah kebijakan struktural, seperti penanganan sektor kesehatan dan pendidikan. "Kini, apa yang bisa dibeli dengan Rp 100.000?" gugatunya.

Maka, selama kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan kondisi riil di masyarakat—dan lebih suka mencari kambing hitam—bersiaplah memanen generasi yang hilang. Tidak lama, cuma dua dasawarsa lagi.

Balita Penderita Gizi Buruk di Sulsel Akan Bertambah

Makassar, Kompas - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memicu melonjaknya harga kebutuhan pokok dipastikan akan menambah jumlah penderita gizi buruk dan gizi kurang di Sulawesi Selatan. Hal ini akan kian parah bila terjadi inflasi hebat pada November 2005.

Bila tidak diantisipasi, masalah ini akan menjadi persoalan berat yang akan dihadapi pemerintah sekaligus menambah panjang berbagai persoalan sosial dan ekonomi sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Pakar gizi dari Universitas Hasanuddin Prof Dr Razak Thaha saat dihubungi di Makassar, Senin (10/10), mengatakan, jumlah balita di Sulsel mencapai 15 persen dari jumlah penduduk yang berkisar delapan juta jiwa.

"Sebesar 10 persen dari jumlah balita di Sulsel, yakni 120.000 jiwa menderita gizi buruk dan 20 persen lainnya yakni 240.000 jiwa menderita gizi kurang. Penderita gizi kurang akan turun ke level gizi buruk, dan mungkin banyak balita yang belum terdeteksi yang kemungkinan akan menjadi penderita gizi kurang yang baru," kata Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas itu.

Dampak paling terasa dan tampak dari kenaikan harga BBM itu, tambah Razak, terutama akan terjadi di Makassar dan beberapa kota/kabupaten lain yang persentase gizi buruknya tinggi. Ini terutama bila sudah mulai terjadi pemutusan hubungan kerja yang juga akan berdampak pada banyak sektor ekonomi lainnya seperti para pedagang kecil. (ren)

Penderita Sakit Jiwa Meningkat **Jabar Rugi Puluhan Miliar Rupiah**

Bandung, Kompas - Kenaikan harga BBM ditengarai menambah penderita gangguan jiwa. Gangguan jiwa akibat kesulitan ekonomi biasanya menimpa penduduk laki-laki usia produktif. Di awal krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia mengalami kerugian Rp 7 triliun akibat banyaknya penderita gangguan jiwa.

Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dalam sambutannya saat peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia mengatakan, kenaikan harga BBM, harga barang, dan ongkos transportasi meningkatkan angka pengangguran, kriminalitas, kerusakan lingkungan, juga menimbulkan stres dan depresi. Akibatnya, kecenderungan gangguan jiwa pun meningkat.

Meski belum ada penelitian dampak BBM terhadap kesehatan jiwa, Benny Ardjil, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Bandung, di Bandung, Senin (10/10), berasumsi kenaikan harga BBM meningkatkan jumlah penderita gangguan jiwa.

Menurut dia, gangguan jiwa dipengaruhi daya adaptasi seseorang atas perubahan di lingkungannya. "Jika seseorang kurang mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam masyarakat, seperti pengaruh kenaikan BBM yang tidak terduga, ia bisa menderita gangguan jiwa," paparnya.

Dilihat dari jenis kelaminnya, menurut Benny, di rumah sakit jiwa lebih banyak pasien lelaki. Dadang Sukandar, Direktur RSJ Cimahi, mengatakan, di RSJ Cimahi pasien gangguan jiwa lelaki berjumlah dua kali lipat daripada pasien perempuan.

Menurut Machmud, Direktur RSJ Bandung, lelaki lebih rentan mengalami gangguan jiwa saat krisis ekonomi karena menanggung ekonomi keluarga.

Dari data di RSJ Cimahi, jumlah penderita gangguan jiwa pada Januari-April 2005 terus menurun. Namun, setelah kenaikan harga BBM April lalu, pada Mei-September jumlahnya terus naik. Pasien RSJ Cimahi terbanyak usia 25-44 tahun, lalu usia 45-64 tahun. Mereka merupakan kelompok usia produktif.

Kerugian miliaran rupiah

Menurut Dadang, data tahun 2003 menunjukkan, Jawa Barat memiliki penduduk usia kerja sekitar 16,5 juta jiwa. Dengan upah minimum regional rata-rata Rp 20.000 per hari, diperkirakan kerugian yang ditanggung Jawa Barat sekitar Rp 49,5 miliar. Angka ini di luar ongkos yang dikeluarkan pemerintah guna mengobati pasien gangguan jiwa. Untuk pengobatan sebulan, negara harus belanja Rp 1,5 juta-Rp 2,5 juta per jiwa.

Kepala Unit Rawat Jalan dan Rehabilitasi RSJ Cisarua Safari Soma mengatakan, kerugian akan bertambah karena biaya berobat jalan pasien dan penderita gangguan jiwa belum dihitung.

Fita Rosemary, Kepala Subdinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, mengakui, kesehatan jiwa belum menjadi prioritas. Untuk program kesehatan jiwa, tahun ini anggarannya hanya Rp 300 juta.

Kenaikan Tarif Angkutan Umum Tak Pernah Berarti bagi Sopir

ESTER L NAPITUPULU

Memenuhi target setoran yang ditetapkan pemilik atau pengusaha angkutan umum setiap hari, lalu berusaha mencari kelebihan setoran supaya ada sedikit uang yang bisa dibawa pulang untuk menghidupi keluarga. Hanya itulah harapan sopir atau kernet.

Kehidupan sopir dan kernet angkutan umum di Jakarta benar-benar mengandalkan uang yang didapat hari itu. Jika uang yang didapat sudah melebihi setoran, sopir dan kernet pun bisa sedikit bernapas lega.

Tetapi, menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang besarnya mencapai 100 persen lebih itu begitu memukul perasaan para sopir. Banting tulang seharian di jalanan Jakarta yang semrawut itu pun seakan tidak ada artinya.

Justru para sopir kini pusing luar biasa karena sering nombok alias menutupi kekurangan setoran. Kenaikan tarif angkutan umum yang pasti terjadi jika harga BBM naik tidak pernah berarti apa-apa bagi mereka.

Sayangnya, tarif baru yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI tidak memuaskan pengusaha dan awak angkutan umum. Tarif yang dibebankan kepada penumpang lebih besar Rp 500-Rp 1.100 dari tarif baru yang direstui pemerintah.

Para sopir berharap mereka tidak ditilang karena melanggar tarif resmi. Seharusnya urusan penertiban pemberlakuan tarif itu dilakukan langsung kepada pemilik angkutan umum.

Pasalnya, sopir memberlakukan tarif bukan atas kemauan sendiri. Kenaikan tarif yang melampaui tarif resmi direstui perusahaan atau organisasi yang menaungi mereka. Alasannya, tarif baru dari pemerintah tidak mampu menutupi biaya BBM, apalagi kewajiban menyerahkan setoran.

"Kenaikan harga BBM sekarang membuat sopir menangis. Bos tidak mau tahu jika sopir kewalahan mencari uang hanya untuk bisa beli solarnya. Buat pemilik, kalau mau tetap narik ya beri setoran yang dia tetapkan. Kalau tidak, masih ada orang lain yang mau narik," kata seorang sopir metromini jurusan Kampung Rambutan-Lebak Bulus.

Tiga hari tidak pulang

Pemilik metromini tersebut memang hanya menaikkan setoran sebesar Rp 60.000 sehingga besarnya menjadi Rp 430.000. Tapi, uang pembelian solar untuk enam rit yang naik 100 persen menjadi Rp 250.000 dan uang montir Rp 38.000, atau pengeluaran lainnya, ditanggung sopir.

"Saya sudah tiga hari tidak pulang. Tidur saja di mobil. Mau bawa apa untuk anak dan istri. Kelebihan setoran yang didapat sudah habis untuk makan yang makin mahal," ujarnya.

Nasib serupa bukan saja dialami para sopir yang bekerja pada pemilik angkutan perorangan, semisal mikrolet atau metromini. Sopir dan kernet yang tergabung dalam perusahaan angkutan umum yang dikelola pemerintah, seperti Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) atau perusahaan swasta lainnya yang bisa dibilang ternama juga setali tiga uang.

Sopir PPD beruntung punya gaji bulanan meskipun besarnya masih di bawah upah minimum regional DKI. Tetapi, untuk bisa mendapat gaji mereka harus menunggu berbulan-bulan dan mogok kerja. Masa depan mereka pun tidak jelas karena PPD di ambang kebangkrutan tanpa ada keinginan kuat dari pemerintah untuk membenahi.

Kehidupan sopir dan kernet PT Mayasari Bhakti, perusahaan angkutan umum swasta yang bisa dibilang menguasai jalanan Jakarta, juga punya keluh kesah yang sama. Sopir dan kernet sekarang cuma karyawan kontrak.

Nurahman (47), sopir P-17 jurusan Kampung Rambutan-Senen, mengatakan, untuk operasional, perusahaan menyediakan BBM untuk hitungan empat rit dan uang jalan yang besarnya sekitar Rp 100.000 lebih setiap bulannya. Di luar itu, beban pengeluaran ditanggung sopir.

Sopir dan kernet bisa bertahan hidup dengan mencari kelebihan setoran yang besarnya sekitar Rp 25.000-Rp 50.000. Tetapi, kelebihan itu tidak berarti apa-apa saat semua harga juga ikut melambung tinggi.

Rasanya tidak berlebihan jika sopir kemudian melontarkan ucapan sinis jika mereka hanya "sapi perahan" pemilik angkutan umum. Lalu, mengapa tetap bertahan? Jawaban kompak yang muncul adalah mereka tidak bisa menemukan pekerjaan lain.

Azis Rismaya Mahfud, Direktur Operasi PT Mayasari Bhakti, mengatakan, hitungan kenaikan tarif angkutan umum dari pemerintah selalu bersifat politis sehingga merugikan pengusaha. Jika pemerintah punya perhatian kepada angkutan umum, seharusnya pemerintah menetapkan harga riil, lalu memberikan subsidi supaya tidak memberatkan masyarakat.

Petani Sayur Terancam Gulung Tikar

Pekanbaru, Kompas - Kenaikan harga bahan bakar minyak diikuti kenaikan harga berbagai jenis pupuk menghantam telak bisnis pertanian sayur-mayur di Pekanbaru, Riau. Ratusan petani di pinggiran Kota Pekanbaru terpaksa memangkas habis dana pembelian pupuk dan mengurangi intensitas penyemprotan air dari pompa berbahan bakar solar. Akibatnya, kualitas sayur menurun tajam dan usaha ini terancam gulung tikar.

Biaya produksi per petak lahan sayur seluas 3 x 20 meter sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya sekitar Rp 300.000 untuk sekali masa tanam 15 hari. Saat ini, biaya itu membengkak hampir dua kali lipat. Kebutuhan solar yang biasanya Rp 12.000 per hari, berlipat menjadi Rp 25.000. Pupuk kandang semula Rp 2.500 per karung menjadi Rp 3.500. Urea saat ini dijual Rp 2.400 per kilogram atau naik Rp 600. Ironisnya, harga sayur, seperti bayam, tetap saja tidak mengalami kenaikan, yaitu Rp 150 per ikat.

"Pemakaian pupuk NPK dan TSP sudah kami hentikan sejak kenaikan harga BBM. Jika ini berlangsung terus-menerus, jelas sayuran kami makin tak berkualitas. Tak tahu lagi nasib kami empat-enam bulan ke depan," kata Yanto (35), petani sayur di Marpoyan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Sabtu (8/10).

Yanto memulai usahanya sebagai petani sayur sejak tahun 1999 dengan memanfaatkan lahan kosong. Saat ini terdapat sedikitnya 10 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 30-40 petani di Pekanbaru, Rumbai, dan Minas.

Setiap tahunnya tak kurang 13.000 ton sayur dihasilkan dan dipasarkan di lintas kabupaten/kota di Riau dan sekitarnya. Sayur dari ini dipasarkan ke beberapa daerah di Riau, bahkan menembus pasar Singapura sebanyak 30 ton setiap minggu.

"Usaha ini terus berkembang, awalnya saya hanya menggarap seperempat hektar lahan saja. Sekarang, dengan hampir satu hektar lahan saya mampu menghasilkan 1.000-1.500 ikat sayur bayam, kangkung, sawi, dan selada setiap hari," kata Yanto.

Bersama kakaknya, Suyatno, Yanto termasuk perintis pertanian sayur di Marpoyan. Di daerah pinggiran sekitar 10 kilometer dari Kota Pekanbaru, banyak lahan terbuka yang belum dimanfaatkan pemiliknya. Memanfaatkan lahan tidur untuk menanam sayur terbukti bermanfaat bagi pengelola, sekaligus juga berperan dalam menghijaukan kawasan pinggiran kota. Bisnis sayur ini juga menjadi alternatif alih profesi para buruh tebang dan angkut penebangan hutan.

Namun, kini ketidakjelasan nasib kembali membayang. Yanto dan petani sayur lainnya di Pekanbaru hanya dapat mengharapkan pemerintah setempat menetapkan kebijakan khusus untuk menyelamatkan mata pencarian mereka. (nel)

Angkutan Truk Lewat Pantura Terpaksa Mengoplos Solar

Indramayu, Kompas - Kendaraan bermesin diesel yang melewati jalan darat di jalur pantai utara atau pantura banyak membeli minyak tanah sebagai campuran bahan bakar. Pasalnya, harga bahan bakar minyak solar yang naik menjadi sekitar Rp 4.000 hingga 5.000 per liter. Para penjual minyak tanah dapat ditemui di sepanjang jalan raya Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan pantauan, Minggu (9/10), minyak tanah yang dijual dalam jeriken 15 hingga 20 liter ini dijual secara terbuka di pinggir jalan. Tempat penjualan minyak tanah pun kerap berdekatan dengan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum.

Dalam satu hari sekitar empat hingga lima jeriken dapat mereka jual. Perbandingannya, untuk tiga jeriken minyak tanah berisi 15 liter per jeriken dicampur sekitar 15 jeriken solar.

Menurut Lamsijan, penjual minyak tanah, mengatakan, ia mendapatkan pasokan minyak tanah dengan membeli dari warung-warung pengecer dari berbagai desa tetangganya, seperti Desa Babadan, Desa Cangkok, Desa Gunung Sari.

Menanggapi ini, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas Cirebon Andi Effendi hanya bisa mengimbau sekaligus mengatakan kepada para pengecer dan penjual minyak tanah itu untuk tidak lagi meneruskan perbuatan ilegal mengoplos minyak tanah itu. (d01)

Momentum Bangkitnya Pelaku Lama Kriminal **MH Samsul Hadi**

Kejahatan di jalan raya menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama menjelang dan sesudah kenaikan harga bahan bakar minyak. Memang, belum ada data statistik soal itu, tetapi tingginya frekuensi pemberitaan media seputar kejahatan di jalan belakangan ini memperkuat naiknya tren kriminalitas jalanan.

Bukan sekali-dua kali Zaini (45), sopir pada sebuah perusahaan pengarah tenaga kerja, itu mengambil uang dari bank hanya berkendaraan sepeda motor. Seperti biasa, uang yang baru diambil juga cuma dimasukkan di balik bajunya. Setelah itu, ia melaju kembali ke kantor di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Menurut istrinya, Susan, pekerjaan itu sudah dilakukan Zaini bertahun-tahun, baik untuk mengambil uang atau menukarkan uang. Jumlah uang yang dibawa tidak sedikit, belasan ribu dollar AS. Pernah juga mencapai 20.000 dollar AS (setara Rp 200 juta dengan kurs Rp 10.000 per satu dollar AS). Sejauh ini, aman-aman saja.

Namun, tidak demikian dengan pengambilan uang pada Kamis (6/10) siang lalu. Selesai mengambil uang 15.000 dollar dari Bank BNI Jalan Sudirman, ia dirampok di Jalan Tebet Timur Dalam II, Tebet, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.30.

Seperti dituturkan kepada istrinya, Zaini yang saat itu berboncengan dengan Budi (37) mengaku tidak merasa dibuntuti siapa pun. Tetapi saat memasuki Jalan Tebet Timur Dalam II, tiba-tiba dua sepeda motor yang masing-masing dinaiki dua pria memepetnya.

Salah satu dari mereka mencabut kunci sepeda motor yang sedang dinaiki Zaini dan Budi sehingga sepeda motor itu pun berhenti. Untuk menyelamatkan uang belasan ribu dollar di balik bajunya, Zaini lari ke toko bangunan.

Sebuah letusan senjata api menghentikan langkah Zaini. Saat itulah, perampok bersenjata celurit merobek baju dan kaos singlet yang dikenakan Zaini, serta merampas uang dari balik bajunya. Menurut suami saya, perampok merobek dengan tangannya, bukan dengan celuritnya. Tidak ada luka di badan suami saya, ujar Susan.

Perampok melepaskan satu lagi tembakan sebelum kabur. Menurut saksi mata di tempat kejadian, tidak terdengar adanya teriakan korban saat perampokan terjadi.

Situasi abnormal

Peristiwa di siang hari itu hanyalah satu contoh kasus kriminalitas di jalan raya akhir-akhir ini. Sebelumnya, perampokan di jalan raya telah mewarnai lembaran surat kabar Ibu Kota, dengan korban yang beragam, mulai dari nasabah bank, pegawai negeri, hingga warga negara asing.

Berbagai tindak kriminalitas jalanan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks situasi sosial masyarakat Jakarta saat ini. Menurut Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Komisaris Besar Ketut Untung Yoga, dari aspek pemenuhan kebutuhan hidup, situasi sosial masyarakat kini cenderung tidak normal dan kurang stabil.

Hal itu terjadi akibat kesulitan hidup pascakenaikan harga BBM dan menjelang Lebaran, Natal/Tahun Baru. Orang yang tidak punya dan tidak mampu menahan diri (dari dorongan kebutuhan hidup) cenderung melakukan penyimpangan. Mulai dari yang kecil hingga tindak kriminal, paparnya.

Hal senada dilontarkan kriminolog Universitas Indonesia Erlangga Masdiana. Situasi tidak stabil di masyarakat akan memicu maraknya kejahatan yang langsung berhadapan dengan massa, seperti perampokan, penipuan, pencurian, dan lain-lain.

Situasi ini akan dilihat sebagai opportunity (kesempatan) untuk melakukan kejahatan, kata Erlangga.

Tak heran kalau pelaku kriminal pun bukan hanya mereka yang kesulitan ekonomi. Melainkan juga kelompok-kelompok lama yang memanfaatkan situasi tidak stabil dan abnormal itu sebagai momentum untuk beraksi di jalanan. Ini menjadi tantangan sekaligus ancaman agar kita melakukan langkah-langkah preventif, kata Yoga.

Tak pandang bulu

Kriminalitas jalanan mempunyai karakteristik yang khas. Antara lain korban bisa berasal dari semua kalangan dan dipicu oleh situasi jalanan. Yoga memaparkan, pelaku kriminal jalanan selalu memperhitungkan faktor kelengahan publik dalam beraksi, seperti tempat yang pengawasan orang satu sama lain begitu longgar, tempat yang penataan kawasannya secara acak-acakan.

Modus kriminalitas jalanan itu bervariasi, misalnya penodongan, perampasan dengan penganiayaan, hingga pengembosan ban mobil korban. Modus pengembosan ban ini juga cukup marak, seperti dua kasus di Kota Tangerang yang menimpa Suyitno Adang (53), anggota PNS, dan Jennifer L Presscott, warga Australia.

Keduanya menjadi korban perampokan di jalan setelah ban mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba kempes. Saat si pengendara lengah selama mengecek ban itulah, penjahat beraksi. Adang kehilangan uang Rp 50 juta dan Presscott kehilangan surat-surat penting senilai Rp 500 juta.

Modus pengembosan tidak hanya dilakukan dengan memasang ranjau paku, tetapi juga bisa dengan alat yang ditembakkan ke ban mobil, jelas Yoga.

Di dekat Pejompongan ada kelompok dari luar Jawa yang bermain dekat arteri Pondok Indah dan Simprug. Mereka beraksi antara petang hingga malam atau dini hari, katanya.

Khusus untuk nasabah bank, menurut Yoga, bukan tidak mungkin karena ada informasi yang dibocorkan dari kalangan internal bank atau perusahaan yang mengambil uang tersebut.

Kalau ada informasi yang bocor ke penjahat, berarti ada orang dalam binaan penjahat, ujar Yoga.

Terlepas dari itu, kewaspadaan masyarakat memang tetap dituntut. Tak ada salahnya pula minta pengawalan dari polisi. Paling tidak, selalu ingatlah nomor telepon 112 atau SMS ke 1717 untuk informasi cepat ke polisi....

KLP Rinjani Bubar 20 Ribu Pelanggan Listrik Di Lombok Timur Bakal Menjerit

Penulis: Yusuf Riaman

MATARAM--MIOL: Sekitar 20 ribu pelanggan listrik di Lombok Timur NTB terancam tidak dapat lagi menikmati penerangan menyusul kian beratnya biaya operasional yang dirasakan Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Rinjani yang kini listrik hanya dinyalakan pada malam hari saja.

"Tidak ada pilihan lain bagi kami selain bubar jika pemerintah tidak segera merespon solusi yang kami ajukan," kata Manager KLP Sinar Rinjani Abd Muthallib kepada wartawan yang datang berkunjung Kamis (13/10) ke KLP Sinar Rinjani, Kecamatan Aikmmel, Lombok Timur.

Muthalib mengatakan, untuk menyelamatkan 20 ribu pelanggan yang tersebar di 42 desa dan 9 kecamatan, pihaknya mengusulkan tiga jalan keluar. Pertama, Bantu tanggulangi harga BBM melalui subsidi. Jika tidak bisa, KLP diizinkan untuk sesuaikan tarif. Alternatif terakhir, dilakukan interkoneksi dengan pihak PLN. Artinya, koperasi tersebut membeli daya ke PLN kemudian harga jual disesuaikan.

Sebagaimana disaksikan wartawan Kamis siang tidak satupun dari delapan mesin pembangkit KLP Rinjani yang hidup, pemadaman itu mulai dilakukan secara bertahap sejak harga solar naik. Sebab KLP ini membeli solar digolongkan pada harga pasar berbeda dengan PLN yang dapat subsidi meskipun sama-sama untuk tujuan suplai listrik bagi masyarakat.

Operasional tidak lagi 24 jam terhitung sejak (3/10) lalu dua hari setelah harga BBM naik pemadaman awalnya dilakukan selama 4 jam sehari. Menyusul kemudian jam pemadaman diperpanjang dari pukul 5.30-17.00 setelah harga solar naik lagi jadi Rp6.000/liter

Dengan harga solar Rp6.000/liter serta kebutuhan sebanyak 16.500 liter sehari berarti sebesar Rp3 miliar/bulan untuk beli solar yang harus dikeluarkan KLP Sinar Rinjani, sementara tarif harga jual listrik masih tetap sebesar Rp2000/kwh yang semestinya sudah naik menjadi Rp2500-Rp3000/kwh.

Muthallib mengatakan, belakangan ini sudah ada kabar solar bakal dinaikkan lagi jadi Rp6250/liter, "Kami tidak sanggup, kami minta pemerintah segera memperhatikan hal ini," kata Muthallib. (YR/OL-1).

UNJUK RASA: Massa Blokir Jalan di Surabaya

SURABAYA (Media): Ratusan orang dari Front Rakyat Jawa Timur (Jatim) melakukan aksi blokir Jalan Ahmad Yani di bundaran Waru Surabaya, kemarin.

Massa menuntut agar pemerintah merevisi kebijakan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan mengajak warga untuk melakukan mogok nasional.

Akibat aksi massa itu, jalur lalu lintas dari Surabaya menuju Sidoarjo berhenti total. Sebelumnya massa yang menguasai setengah badan jalan, bergerak *long march* dari bundaran Waru menyusuri Jalan Ahmad Yani menuju kota Surabaya, sehingga memacetkan arus lalu lintas.

Para pengunjung rasa yang berjalan kaki itu berhenti di depan Gedung Graha Pena (Jawa Pos Grup), berteriak dan menyebarkan selebaran seruan mogok nasional.

Aksi blokir jalan itu hanya berlangsung sekitar 15 menit karena polisi segera membubarkan massa.

Dari Tulungagung Jatim dilaporkan, ratusan awak bus jurusan Tulungagung-Surabaya, kemarin pagi melakukan aksi mogok operasi.

Aksi protes terhadap kenaikan harga BBM itu, berakibat puluhan calon penumpang tidak terangkut dan menumpuk di Terminal Kota Tulungagung.

Kepala Unit Terminal Tulungagung Maryani mengatakan pihaknya menyiapkan dua bus milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengangkut para penumpang. "Kita cuma bisa mengantisipasi dengan menyiapkan bus cadangan," kata Maryani.

Pengamatan *Media* mencatat ada sekitar 100 bus yang dikandangkan serta diparkir di halaman dalam terminal Tulungagung, antara lain Perusahaan Otomotif (PO) Sri Lestari, Surya Kentjana serta Harapan Jaya.

Sementara itu, jalur transportasi darat dari Kupang tujuan tiga kabupaten di daratan pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), kemarin juga lumpuh, karena aksi mogok ratusan sopir yang memprotes kenaikan harga BBM.

Aksi itu dilakukan serentak di empat kota, yakni Kupang, Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Atambua, dan Kabupaten Belu. (HS/ES/PO/N-4).

BBM Naik, Bisnis Travel Penerbangan Lesu

TANGERANG -- Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) ternyata berimbas pada usaha tour dan travel penerbangan di Tangerang. Mereka mengeluhkan omset usahanya turun antara 30 hingga 40 persen.

Erick, bagian tiketing dan reservasi PT Hari Pesona Wisata di kawasan BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang mengungkapkan, dari transaksi yang dilakukan mulai 1 Oktober hingga kemarin (12/10) baru ada sekitar 40 hingga 50 pemesan tiket. Biasanya menjelang Hari Raya, tiket untuk satu kapasitas airlines yang berisi 300 set sudah habis terjual. "Jumlah pesanan itu untuk Garuda Indonesia Airlines. Sedangkan, untuk pesawat domestik lainnya pemesan masih berkisar di bawah 40 orang," kata Erick, kemarin.

Menurutnya faktor geografis juga ikut menentukan lesu tidaknya bisnis travel penerbangan. Pesawat dipilih masyarakat, apabila jarak tempuh perjalanan memang terbilang jauh. Sedangkan jika tujuannya dekat, maka masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi darat seperti kereta api dan bus. "Harga yang diberikan travel tergantung jauh dekatnya jarak tempuh. Untuk saat ini, pemesan tiket terbanyak untuk tujuan Jakarta-Denpasar dan Jakarta-Pontianak. Harga tiketnya Rp785 ribu untuk promo dan untuk harga normal Rp1 juta," ujar Erick.

Harga promo hanya berlaku selama tujuh hari sedangkan untuk harga normal berlaku dalam jangka waktu selama sebulan. Mulai 1 Oktober hingga kemarin (12/10) pihaknya masih memakai harga promo. Namun, pada 29 Oktober hingga 9 November 2005, mengalihkan dengan harga normal.

Kasi reservasi dan tiketing Mandala Airlines, Elly Agustini, menjelaskan, sejauh ini pemesan tiket belum ada lonjakan menjelang Hari Raya. Pasalnya, mereka masih menunggu waktu yang tepat. "Mungkin mereka menunggu tunjangan hari raya (THR) keluar, baru bisa memutuskan beli tiket atau tidak," kata Elly yang berkantor di Ruko Vila Melati Mas, Serpong.

Buntut kenaikan BBM juga dirasakan sejumlah pengemudi taksi di Bekasi. Sejumlah sopir taksi terpaksa berhenti bekerja akibat tidak mampu memenuhi setoran untuk perusahaan. "*Gimana nggak* pada mau berhenti? Penumpang *nggak* ada, terus setoran dari mana?" gerutu Edi Edwan, pengemudi Dian Taksi di Bekasi, kepada *Republika*, Kamis (13/10).

Edi mengungkapkan, sekitar 20 rekan seprofesinya telah memutuskan berhenti bekerja karena setiap hari setelah kenaikan BBM mereka tidak pernah mendapatkan uang untuk setoran. Walaupun bernasib sama, Edi mengaku tidak akan mengikuti jejak kawan-kawannya karena bingung mau bekerja sebagai apa lagi. "Namanya juga usaha, *kalo* hari ini *nggak dapet* setoran, Mudah-mudahan besok *dapet*," harap Edi.

Selain Edi, pengemudi taksi lainnya, Yuda (Dian Taksi) dan Syahroni (Koperasi Taksi Indonesia), juga mengeluhkan hal yang sama. Mereka tak mampu mendapatkan uang setoran per harinya yang berkisar antara Rp 180 ribu-Rp 220 ribu.

(c41/c42)

Warga Mulai Mendatangi Pegadaian

JAKARTA -- Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sejak 1 Oktober 2005 lalu mengakibatkan warga mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian mencari alternatif menggadaikan barang berharga milik mereka ke pegadaian terdekat.

Seorang ibu rumah tangga, Sri Wahyuni warga Penggilingan, Cakung Jakarta Timur mengaku harus menggadaikan perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Seumur hidup saya baru sekali menggadaikan barang," tuturnya saat mendatangi Kantor Pegadaian Cabang Penggilingan, Jakarta Timur Senin (10/10). Ia mengaku pasca kenaikan BBM, pengeluaran naik drastis. "Apalagi saya punya kendaraan, dampaknya sangat terasa."

Senada dengan Wahyuni, Puji Lestari, seorang warga RT 06 RW 09 Penggilingan, Cakung Jakarta Timur datang ke pegadaian untuk menggadaikan sebuah televisi 14 inch. "Saya terpaksa menggadaikan televisi untuk menutup kebutuhan rumah tangga bulan ini."

Kepala Pegadaian Cabang Penggilingan Jakarta Timur, Kriswanto membenarkan ada kenaikan jumlah masyarakat yang menggadaikan barang beberapa hari terakhir. "Untuk Senin (10/10), terjadi kenaikan sampai 30 persen dibanding sehari sebelumnya," tuturnya pada wartawan, kemarin.

Warga Miskin Mulai Makan Nasi Kering

Banyak keluarga mampu dan kaya yang mendapatkan KKB.

INDRAMAYU -- Nasib rakyat miskin di daerah pesisir Pantura, Desa Totoran, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, sangat mengenaskan.

Selain belum menerima dana kompensasi BBM, dampak kenaikan harga sembilan bahan pokok hidup mereka saat ini, semakin mencekik kondisi ekonominya. Akibatnya, tak sedikit dari keluarga miskin ini harus memakan nasi kering (*sega aking*) yang dimasak ulang. "Kalau tidak punya uang, istri saya terpaksa berutang untuk sekedar membeli makanan di warung. Bahkan, sering pula kami terpaksa makan nasi kering yang kami rebus terlebih dahulu," ujar Suparno (45 tahun), seorang warga di RT 08/03, Desa Totoran, kepada *Republika*, Kamis (13/10).

Di Kabupaten Indramayu, sebanyak 141.605 warga miskin penerima dana KKBBM, hingga kini, merasa resah. Hal itu menyusul penundaan pembagian kartu kompensasi BBM (KKB), yang seharusnya sudah mereka terima sejak 11 Oktober lalu. Suparno dan keluarganya yang menempati rumah bilik kayu berlantai tanah liat itu sangat menantikan pembagian KKB tersebut sejak harga BBM dinaikkan pemerintah, 1 Oktober silam. Ia menjelaskan, hidup yang dijalannya bersama seorang istri dan lima orang anak, kini semakin berat sejak harga BBM naik.

Menurut Suparno, selama ini, dirinya hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp 25 ribu setiap kali bekerja. Namun, pekerjaan itu tidak setiap hari didapatkan. Bahkan, tak jarang ia tidak mendapatkan satu pekerjaan pun selama seminggu. Hal senada diungkapkan warga lainnya, Talam (40). Ia mengaku tak memiliki pekerjaan tetap sehingga sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. "Kalau tidak punya makanan, saya sering memancing ikan untuk teman makan," kata Talam.

Kepala BPS Kab Indramayu, Erwan Syahriza mengatakan, Kab Indramayu memang mengalami penundaan pembagian KKB sebanyak tiga kali, yakni tanggal 1, 3, dan 11 Oktober. Penundaan itu disebabkan adanya keterlambatan pencetakan KKB di BPS pusat. Sedangkan dari Kabupaten Karawang dilaporkan, pembagian KKBBM untuk rakyat

miskin, dinilai semrawut. Banyak keluarga mampu dan kaya yang mendapatkan KKB. Padahal, ratusan hingga ribuan warga miskin masih belum terdata oleh petugas badan pusat statistik (BPS) setempat.

Akibatnya, ratusan warga Kecamatan Tirtaya, Kabupaten Karawang, memblokir kantor kecamatan Tirtajaya untuk mempertanyakan mengenai tidak terdaftarnya mereka sebagai keluarga miskin (gakin). "Mereka memblokir kantor kecamatan Tirtajaya," kata Ketua Fraksi DPRD Karawang, Tono Bachtiar, kepada *Republika*, Rabu (12/10). Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Batu Jaya. Bahkan, di kecamatan ini, banyak keluarga mampu dan kaya malah mendapatkan KKB. Komisi D DPRD Karawang yang langsung melakukan peninjauan ke lapangan, membenarkan adanya temuan mengenai kekeliruan pengalokasian KKB.

"Kita mendapatkan laporan dari tokoh masyarakat hingga Sekdes Batujaya-nya sendiri, memang banyak keluarga mampu dan kaya yang justru mendapatkan KKB," kata Ketua Komisi D DPRD Karawang, Dedi Sudrajat. Sedangkan BPS Kota Bandung, hingga kemarin sudah menerima sekitar 600 aduan tentang berbagai macam keluhan masyarakat seputar pembagian KKBBM. Jumlah itu belum termasuk keluhan yang diterima oleh seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung.

Penjualan Timun Suri pun Terkena Imbas Harga BBM

Buah berwarna kuning cerah ini, pasti menggoda setiap mata bagi orang yang memandang. Bentuknya yang menyerupai markisa, seringkali kita jumpai di emper jalan di beberapa sudut Kota Bandung, akhir-akhir ini.

Memang, buah ini, mucul setiap saat menjelang bulan suci Ramadhan. Buah ini tumbuh subur di lahan-lahan pertanian di daerah dataran rendah seperti Cikampek, Bekasi, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Masyarakat petani di daerah itu, memanfaatkan lahan sawahnya yang sudah tidak bisa ditanami padi dengan buah tersebut. Di kalangan mereka, buah ini disebut sebagai *bonteng suri*. Namun di perkotaan, buah ini dikenal dengan timun suri.

Daging buahnya yang putih, memang tidak memiliki rasa yang istimewa. Namun akan terasa nikmat menjadikannya sebagai minuman ringan keluarga saat berbuka puasa dengan mencampurnya bersama sirup. Buah ini juga bisa dijadikan salah satu bahan dalam es campur atau dijadikan jus.

Banyak berkah yang didapat dari penjualan buah ini, terutama dari sisi harga yang memang selalu mendadak naik ketika permintaannya semakin besar. "Dari tahun ke tahun, saya tidak pernah merugi jika penjualan buah ini," ucap Aja Suteja (65 tahun) yang sudah penjualan timun suri dari 1982, kepada *Republika*.

Aja mengatakan, harga buah ini melonjak apabila memasuki bulan Ramadhan. Kenaikannya, kata dia, bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari bulan-bulan biasanya. "Saya menjualnya seharga Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kg. Padahal, biasanya hanya berkisar Rp 2.500 per kg," akunya.

Namun, Aja yang menggelar dagangan Jl Cipaganti Bandung ini mengatakan, ada yang berbeda dengan penjualan timun suri tahun ini. Grafik penjualan, kata dia, bisa dikatakan menurun apabila dibandingkan dengan Ramadhan tahun sebelumnya. Kata dia, pada Ramadhan tahun ini, penurunan jumlah pembeli sangat dirasakan. Omzet yang semula bisa dicapainya hingga satu hingga dua kuintal per hari, menurun secara drastis. Ramadhan kali ini, ia hanya mampu menjual 30 kg sampai 50 kg saja per hari.

"Kenaikan harga-harga seperti BBM akhir-akhir ini membuat omzet dagangan saya pun ikut terkena imbasnya," keluh Aja. Tidak hanya Aja yang khawatir dengan kondisi itu. Ada pula Dadan (18) dan Enjang (40) yang satu profesi dengan Aja. Namun, mereka yang penjualan di kawasan Buahbatu ini mengatakan, buah yang dijualnya itu berasal dari Bekasi dan Cikampek.

Kata Dadang, untuk mendatangkan buah tersebut ke Bandung, diperlukan ongkos kirim yang cukup besar. Karenanya, sejak BBM naik, omzet jualannya pun menurun drastis. "Walaupun saya dapat untung, sekarang ini, hanya cukup buat

beli nasi untuk buka puasa dan rokok saja. Saya belum bisa menabung untuk lebaran nanti," ujarnya pasrah. Enjang membenarkan pernyataan Dadan. Menurut dia, pada Ramadhan tahun ini, sulit untuk mendapatkan pembeli.

Selain faktor harga, kata dia, para pembeli sekarang ini lebih memilih untuk berbelanja di supermarket atau pasar swalayan. Padahal, sambung Enjang, harga timun suri di supermarket jauh lebih mahal ketimbang di emperan jalan. "Sudah terhimpit oleh harga BBM yang naik, pedagang kini harus dihadapkan pada persaingan terbuka dengan pasar swalayan," ujar Enjang. Apalagi, lanjut dia menambahkan, dengan adanya perubahan perilaku konsumen yang lebih menyukai pasar swalayan, barang dagangannya pun kian terpuruk dan kalah bersaing.

(dra)